

## Forkopimda Kota Bogor Terjankan 500 Personel

**BOGOR (IM)**- Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor bakal menerjankan 500 personel untuk mengantisipasi gangguan kemandirian masyarakat (Kamtibmas) pada bulan Ramadan 1443 Hijriah.

Sedikitnya ada delapan pos penjagaan untuk melayani masyarakat dalam pencegahan berbagai gangguan ketertiban.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan, ada 4 dimensi yang harus dijaga yakni ibadah, lalu lintas, kesehatan, dan keamanan.

Untuk dimensi ibadah yakni menjamin semua kegiatan ibadah dapat berjalan dengan khushuk.

Kemudian lalu lintas, den-

gan menerjankan polisi untuk menjaga dan mengatur lalu lintas.

Dimensi kesehatan dengan membuka sentra-sentra vaksin di setiap puskesmas untuk memastikan agar mudah lebaran berjalan aman dan lancar.

"Dimensi yang ke empat yakni keamanan. Hari ini kami ekspose hasil ungkap kejahatan dan beragam gangguan di Kota Bogor selama operasi. Ada penyitaan miras, senjata tajam dan knalpot bising," ujar Kapolresta Bogor saat menggelar konferensi pers di Alun-alun Kota Bogor, Jumat (1/4).

Euforia bulan Ramadan sangat menjadi sorotan Forkopimda Kota Bogor karena biasanya menimbulkan tawuran dan kejahatan lainnya. ● **gio**

## Ramadan, Ganjil Genap Kota Bogor Ditiadakan

**BOGOR (IM)**- Selama Ramadan, rekayasa lalu lintas ganjil genap di Kota Bogor ditiadakan. Meski demikian, Polresta Bogor Kota bakal merazia kerumunan sahur, tarawih, hingga knalpot bising.

Hal itu dikatakan Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro usai Apel Kesiapan PAM Antisipasi Gangguan Keamanan Ramadan 1443 Hijriah/2022, di Alun-alun Kota Bogor, Jumat (1/4).

Kapolresta Susatyo menuturkan, selama Ramadan, pemberlakuan ganjil genap kendaraan yang dilakukan setiap akhir pekan untuk menekan tingginya mobilitas warga ditiadakan.

Namun demikian, Susatyo menekankan, setiap aktivitas mengganggu pelaksanaan kenyamanan beribadah selama bulan Ramadan itu pasti akan menjadi perhatian.

"Knalpot bising, sahur on the road, tawuran, balap liar,

semua hal yang berpotensi mengganggu kenyamanan Ramadan, kami lakukan penindakan," kata Susatyo.

Untuk mengawasi hal itu, sebanyak 800 lebih personel polisi akan tersebar di 8 pos pengamanan, dan juga melakukan rekayasa lalu lintas bila terjadi kepadatan kendaraan.

"Sebanyak 8 pos pengamanan baik itu mengantisipasi kejahatan tauran termasuk juga jam-jam sore ngabuburit, juga untuk mengatur supaya tidak terjadi kemacetan parah," katanya.

Kapolresta juga melarang adanya kegiatan razia atau sweeping dilakukan organisasi masyarakat.

"Kami juga sudah bertemu ormas Islam, untuk sama-sama menjaga. Islam agama yang teduh. Tidak ada sweeping. Bila ada silakan laporkan kepada aparat. Pasti kami lakukan penindakan," tambah Susatyo. ● **gio**



IDN/ANTARA

### PERESMIAN RUANG CURHAT DI BANDUNG

Warga mencoret dinding menggunakan kapur saat peresmian Ruang Curhat di Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/4). Pemerintah Kota Bandung meresmikan Ruang Curhat dengan membebaskan warga mencoret dinding menggunakan kapur guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi.

## Pemkab Tangerang Bantu Fasilitas Penyandang Disabilitas Dapat Pekerjaan

**TANGERANG (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang membantu memfasilitasi kalangan disabilitas untuk bisa masuk dalam dunia kerja di beberapa perusahaan di Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono mengatakan, tugas pemerintah membantu dan memfasilitasi agar kelompok difabel mendapatkan hak yang sama dengan pekerja normal lainnya.

Hal itu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. "Kita akan fasilitasi dan memberi pendampingan kepada mereka untuk memiliki kesempatan bekerja di setiap perusahaan. Pasalnya, perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1 persen dari jumlah total tenaga kerja yang ada," katanya di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/4). Rudi menyebutkan, saat

ini, setidaknya ada 10 orang penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna daksa sudah mengikuti seleksi untuk pengisian jabatan di salah satu perusahaan di Kabupaten Tangerang. "Saya berharap agar semua perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang dapat melaksanakan amanat undang-undang ini, setidaknya perusahaan dapat memperkerjakan satu persen disabilitas di perusahaannya," tuturnya.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kabupaten Tangerang, Iis Kurniati menjelaskan, baru beberapa perusahaan yang melaporkan data memiliki pekerja berstatus penyandang disabilitas. "Data yang kami terima sebanyak 380 penyandang disabilitas terserap di dunia kerja, dari PT Chingluh di Cikupa dan PT Victory Chingluh di Pasar Kemis, dan baru satu perusahaan yang difasilitasi oleh disnaker, yaitu PT PEMI," ujar Iis. ● **pp**

# 8 Nusantara



IDN/ANTARA

### FESTIVAL KULINER TANPA MINYAK GORENG

Peserta memasak olahan makanan tanpa menggunakan minyak goreng di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (1/4). Festival Kuliner Tanpa Minyak Goreng tersebut digelar untuk mengampanyekan diversifikasi pangan tanpa gorengan sekaligus upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak goreng kelapa sawit.

## Lahan Sentul City di Bojong Koneng Disita karena Terkait Kasus BLBI

Lahan PT. Sentul City Tbk yang disita Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI Kementerian Keuangan, merupakan objek wisata Sentul Paradise Park atau yang lebih dikenal dengan nama Curug Bidadari.

### BABAKAN MADANG

**(IM)**- Dibantu TNI dan Polisi, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kementerian Keuangan, menyita aset lahan di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang di antaranya milik Sentul City.

Selain dikabarkan menyita aset lahan milik obligor Agus Anwar, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI Kementerian Keuangan juga menyita aset lahan sengketa, yang terakhir kali diklaim PT. Sentul City Tbk sebagai lahan miliknya. "Kamis pagi hingga siang,

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI Kementerian Keuangan dibantu ratusan personel TNI dan Polisi memasang plang penyitaan, untuk di lingkungan RT 02 RW 15 Kampung Curug, mereka memasang 6 plang, 4 plang di lahan PT. Sentul City Tbk dan 2 lainnya di lahan persawahan yang saya tidak ketahui siapa pemiliknya," ucap Ketua RT 02, Engkos Kosasih kepada wartawan, Jumat (1/4).

Engkos Kosasih menearangkan, bahwa lahan PT. Sentul City Tbk yang disita Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI Kementerian Keuangan, merupakan objek wisata Sentul Paradise Park atau yang lebih dikenal

dengan nama Curug Bidadari. "Lahan PT. Sentul City Tbk yang sebelumnya bersengketa dengan beberapa orang pihak lainnya juga disita oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI Kementerian Keuangan. Lahan tersebut merupakan objek wisata Curug Bidadari. Pemasangan plang sita tersebut tidak mendapatkan perlawanan, bahkan plang yang menyebutkan lahan tersebut milik PT. Sentul City Tbk sudah dicopot sejak kemarin sore," terang Engkos Kosasih.

Ayah dua orang anak itu menuturkan, penyitaan aset lahan oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI Kementerian Keuangan, sempat membuat masyarakat

sekitar khawatir. Mereka takut lahan milik atau yang mereka tempati ikut disita.

"Warga sempat khawatir, apalagi TNI dan kepolisian membawa senjata lengkap. Namun saya menjelaskan bahwa lahan yang disita adalah lahan yang dimiliki oleh obligor BLBI," tuturnya.

Engkos menjelaskan, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI Kementerian Keuangan masih membolehkan petani penggarap untuk tetap melakukan aktivitasnya.

"Sawah yang disita, katanya petugas sih masih boleh ditanami. Yang penting, lahan tersebut jangan beralih fungsi dan dikuasai," jelas Engkos. ● **pra**

## Wifi Gratis di Alun-alun Kota Bogor Raih Rekor MURI, Tercepat di Dunia

**BOGOR (IM)**- Peluncuran wifi gratis di alun-alun Kota Bogor dan area Stasiun Bogor meraih rekor MURI karena tercepat di dunia dengan rata-rata 1.500-1.900 mbps. Wifi gratis dengan kecepatan maksimum 2.000 mbps itu disediakan Pemerintah Kota Bogor dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) bagi masyarakat dan penumpang KRL.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyampaikan terima kasih kepada PT KAI dan Seacore atas kolaborasi penyediaan wifi gratis itu. "Ini akselerasi yang saya maksud," kata Bima Arya di alun-alun Kota Bogor, Kamis (31/3).

"Pemerintah daerah membangun infrastruktur ruang publik, KAI yang menata dan

menyediakan fasilitas pendukungnya."

Bima mengatakan ruang publik ini dikembalikan kepada publik agar terintegrasi dengan wilayah sekitar dan mendorong akselerasi kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga. "Ini contoh bagaimana 3 pasak itu dilakukan tanpa mengandalkan APBD saja," ujarnya.

Menurut Bima, fasilitas wifi gratis itu disediakan selama Kota Bogor masih berdiri. Masyarakat yang hendak bekerja, bermain atau bersantai di sekitar alun-alun bisa memanfaatkannya.

Pemerintah Kota Bogor akan menyediakan tempat sampah, kursi dan pedestrian. PT. KAI juga akan membuat kafe di sekitar alun-alun yang

berada di antara Stasiun Bogor dan Masjid Agung Bogor itu.

Alun-alun dan Stasiun Bogor juga dapat dijangkau dari Balai Kota Bogor, Polresta Bogor Kota dan Pasar Kebon Kembang. Dalam penataan alun-alun, pemerintah menyediakan sejumlah fasilitas seperti area bermain anak, sarana olahraga dan taman. "Penataan ini akan terus berlanjut," ujar Bima.

Menanggapi rekor MURI untuk wifi gratis tercepat di dunia, Executive Vice President (EVP) Daerah Operasional 1 Jakarta PT. KAI, Suryawan Putra Hia menyebut capaian itu bukan tujuan mereka. "Yang terpenting adalah masyarakat mendapat manfaat yang baik," kata Suryawan. ● **gio**

## Rumah Makan di Tangerang, Wajib Ditutup Tirai hingga Pukul 17.00 WIB

**TANGERANG (IM)**- Rumah makan atau sejenisnya di Kota Tangerang, Banten, wajib ditutup tirai atau gordena mulai pagi hingga pukul 17.00 WIB selama bulan Ramadhan 2022. Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah berujar, hal itu dilakukan untuk menghormati warga yang melaksanakan puasa saat bulan Ramadhan.

"Salam bulan suci Ramadhan, kami minta mereka (rumah makan dan sejenisnya) dari pagi sampai jam 17.00 WIB itu gordena atau tirainya ditutup dalam rangka menghormati (yang puasa)," ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (1/4).

Arief menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang

akan memberikan sanksi kepada rumah makan yang tidak memasang tirai selama waktu yang ditentukan. Sanksi yang akan diberikan mulai dari teguran hingga sanksi administrasi.

"Ya pastinya ada prosesnya ya, nanti di Satpol PP itu teknisnya. Yang pertama pasti ditegur, diberikan sanksi juga kalau misal berulang," kata Arief.

Sementara itu, jam operasional rumah makan tidak dibatasi. Politisi Demokrat itu menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membebaskan jam operasional rumah makan dan sejenisnya selama bulan Ramadhan 2022.

"Bebas saja, kalau jam operasional terserah. Mereka mau buka jam berapa saja boleh," sebutnya. ● **pp**

## BPMU Madrasah Aliyah Disamakan dengan SMA dan SMK



**BANDUNG (IM)**- Pada nota pengantar LKPJ Gubernur tahun 2021, saat ini Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk madrasah Aliyah disamakan dengan SMA dan SMK.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat saat melaksanakan rapat kerja bersama mitra Komisi V dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat dan 13 Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat. Jumat, (1/4).

Achmad Ru'yat menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada Madrasah Aliyah disamakan dengan dengan siswa SMA, SMK dan SLB yaitu sebesar Rp 700.000/siswa.

"Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat terkait update data yang akurat tentang siswa Madrasah Aliyah di Jawa Barat," ujarnya.

Menurut Ru'yat, sebagaimana diketahui bersama bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan nota pengantar LKPJ Gubernur tahun 2021 dan DPRD telah menetapkan jadwal pembahasan di komisi-komisi.

"Kalau kemarin 1 sesi dari berbagai Dinas, namun sekarang didampingi oleh Bappeda

dan BPKAD dengan khusus melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena kami menganggap Komisi V ini di DPRD Jawa Barat berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan sangat penting," terangnya.

Oleh karena itu dirinya berharap, kedepannya agar perencanaan antara komitmen APBD yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan bisa dikspos secara

detail. Kemudian, sampai sejauh mana catatan-catatan strategis LKPJ tahun 2020 ditindaklanjuti.

"Dengan harapan karena posisi sekarang ini LKPJ kalau dahulu setelah reformasi LJP dan ini politiknya sangat tinggi berdampak kepada kepala daerah, kita membahas lebih kearah konten sehingga karena memang itu ada dengan harapan bisa ada dengan perbaikan," tutupnya. ● **lys**